



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jumlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, 24 Februari 2022

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut.**



Ir. SUHARYO

NIP. 19640502 198703 1 020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implimentasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terdiri 4 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan Kepala Bidang Komunikasi. Sedangkan Esselon IV sejumlah 8 Jabatan (2 Kasubbag dan 6 Kasi).

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Visi (Tanah Laut yang Berinteraksi) dan Misi Bupati Tanah Laut, **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaen Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 berorientasi pada sasaran Meningkatnya pemanfaatan SPBE

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi; Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi); Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi; Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian; Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja; dan Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD. Strategi yang disusun untuk mengembangkan komunikasi dan informatika dalam rangka mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait maupun perguruan tinggi dalam hal pengembangan e-government; Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik dengan sistem data terintegrasi; Meningkatkan cakupan media informasi publik; Melakukan kerjasama kemitraan dan hubungan dengan media komunikasi; Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah; Meningkatkan layanan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan dokumen; Menyediakan data statistik sektoral daerah; Pembangunan pusat data yang terintegrasi dengan SKPD. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik; Program Aplikasi Informatik; Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan e-Government, yang diukur keberhasilannya melalui

Indikator Kinerja indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengacu pada Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengikuti Piloting Pelaksanaan SPBE guna meningkatkan nilai/indeks SPBE. Nilai/indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 ini sebesar **2,75** dengan predikat penilaian **baik**. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2021 berdasarkan pada 5 program, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,00	2,75	91,67%
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	50%	22,5%	45%
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebar	100%	97,33%	97,33%
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	20%	2,4%	4,8%
7	Meningkatnya fasilitasi	Persentase SKPD yang	100 %	100 %	100%

	layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	difasilitasi dalam pengembangan inovasi			
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	82 nilai	84,05 nilai	102,5 %
		Nilai SAKIP SKPD	80 nilai	77,85 nilai	97,31%
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	100%

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dari Anggaran Rp. 13.095.733.027 terealisasi sebesar Rp. 11.198.671.599,- (85,51%), dan fisik 92,96%. Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp. 550.144.000,- terealisasi 564.880.000,- (102,68%).

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana komunikasi dan informasi guna menunjang pelaksanaan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pengembangan dan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	6
C. Isu Strategis	
C. Produk dan Layanan	16
D. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Visi RPJMD	19
B. Misi RPJMD	19
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
D. Indikator Kinerja Utama	24
E. Perjanjian Kinerja	25
F. Program dan Kegiatan	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	37
1. Sasaran RPJMD	37
2. Eselon II (Kepala Dinas)	41
3. Eselon III (Sekretaris)	47
4. Eselon III (Kepala Bidang)	52
5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)	70
B. Akuntabilitas Keuangan	122
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021	122
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	125
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	127
BAB IV PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Strategi Peningkatan Kinerja	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

- tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, AKtual, SInergi)”** melalui **pelaksanaan program/kegiatan pada** Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan **Misi (1)**

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan peran pers yang bebas, membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dan menciptakan keterbukaan informasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers yang kondusif bagi pengembangan peran serta masyarakat dalam era globalisasi informasi. Oleh karena itu

secara konsisten, segenap komponen bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut perlu turut serta mendapatkan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian kebebasan di bidang informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut;
2. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut;
3. Terwujudnya inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
4. Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
5. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut.

B. Struktur Organisasi Tugas dan fungsi

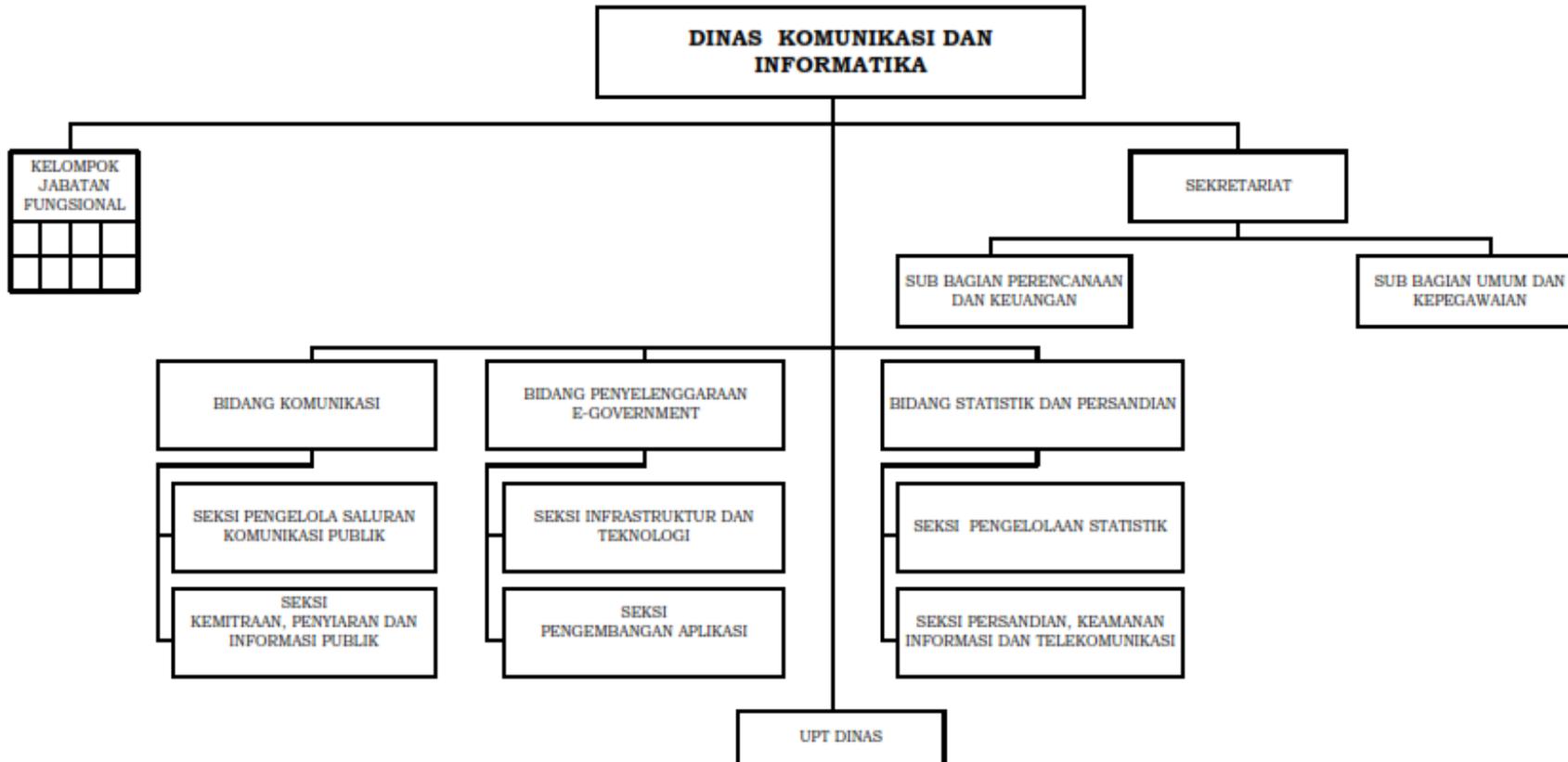
Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam urusan pemerintahan komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 77 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



BUPATI TANAH LAUT,

**Ttd
H. BAMBANG ALAMSYAH**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
 - 2) Seksi Kemitraan Penyiaran dan dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
 - 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
- f. Unit Pelaksana Teknis

Kepala Dinas

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bidang Komunikasi

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
 - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi membawahi dari:

- 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
- 2) Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik.

Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan saluran komunikasi publik.

Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kemitraan, penyiaran dan informasi publik.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
 - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi dari:

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait infrastruktur dan teknologi.

Seksi Pengembangan Aplikasi

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi.

Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
 - b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

Seksi Pengelolaan Statistik

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 17 orang tersebut, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 0 orang (tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas Sekretaris), Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 6 orang, staf pelaksana sebanyak 7 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			0			0
3	Kepala Bidang			3			3
4	Kepala Seksi				6		6
5	Staf PNS					7	7
	JUMLAH		1	3	6	7	17

Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebanyak 7 orang, diikuti golongan II sebanyak 6 orang, golongan IV sebanyak 4 orang serta ditambah tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 23 (delapan belas) orang.

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas			1					1
2	Sekretaris			0					0
3	Kepala Bidang		1	2					3
4	Kepala Seksi			6					6
5	Staf		1		4	2			7
	JUMLAH	0	2	9	4	2	0	0	17

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 2 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Bidang 1 orang dan staf pelaksana 1 orang. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 4 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

C. Isu Strategis

Isu-isu strategis terkait pengembangan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan permasalahan, sebagai berikut:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut
3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut.
4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

D. Produk dan Layanan

Pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Penyiaran iklan layanan masyarakat
- b. Peliputan dan penyiaran
- c. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi)
- d. Pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi
- e. Pengendalian hak akses data
- f. Pemeliharaan dan akses data center
- g. Layanan lapor.go.id Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- h. Manajemen dan akses data jaringan (*network*)
- i. Pembuatan domain *website* resmi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Desa dan organisasi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- j. *Co-Location* / Penempatan server dan hosting aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- k. *Back-up* dan *restore database server* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- l. *Update website*
- m. Layanan data sektoral
- n. Tata kelola berita sandi

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2021 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

1. DAFTAR ISI
2. RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD

- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II (Kepala Dinas)
 - 3. Eselon III (Sekretaris)
 - 4. Eselon III (Kepala Bidang)
 - 5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 4. Cascading/Pohon Kinerja
- 5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

A. Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;

2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1** : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
 - Tujuan** : 1. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut
 - Sasaran** : 1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut
1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)

2. **Misi 2** : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
 - Tujuan** : 2. Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut
 - Sasaran** : 2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi

3. **Misi 3** : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - Tujuan** : 3.1 Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut
3.2 Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan
3.3 Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut
 - Sasaran** : 3.1.1 Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut
3.2.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
: 3.3.1 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian
: 3.3.2 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja

: 3.4.1 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,00
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	50 %
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100 %
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	50 %
7	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	82 nilai
		Nilai SAKIP SKPD	80 nilai

10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80 %
----	--	--------------------------------------	------

Berikut diperlihatkan tabel tujuan, indikator, target, sasaran, indikator dan target 5 Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.2 Tujuan, indikator, target, sasaran, indikator, target 5 tahun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya tata kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan	2,8	3.1 Meningkatkan pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
			100%	3.2 Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%
			100%	3.3 Meningkatkan penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi publik	100%	1.1 Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebar	100%	100%	100%	100%	100%
				1.2 Meningkatkan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %
		Persentase peningkatan	100 %	1.3 Meningkatkan	Persentase SKPD yang	2,4%	50%	20%	20%	7,6%

		SKPD terhadap keamanan informasi		SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	memanfaatkan sandi (keamanan informasi)					
3.	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut	Persentase inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	2.1 Meningkatnya fasilitas layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	100%	3.4 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terlaksananya pemenuhan tata kelola pemerintahan di SKPD	100%	3.5 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	-	80 nilai	82 nilai	84 nilai	86 nilai
					Nilai SAKIP SKPD	78 nilai	79 nilai	80 nilai	81 nilai	82 nilai
5.	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	Persentase data sektoral SKPD yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	3.6 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	80%	100%	100%

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran strategis adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Hasil Penilaian SPBE dari Menpan RB	Dinas Kominfo

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 yang telah disepakati baik oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Perjanjian/Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2021 (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3.00

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.938.101.954
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	2.536.085.402
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp	5.536.996.792
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	74.910.000
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	49.990.390
Jumlah		Rp	13.136.084.538

Perjanjian/Penetapan Kinerja Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	1. Persentase tata kelola administrasi utama dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	2. Nilai RB SKPD	82 nilai
		3. Nilai SAKIP SPKD	80 nilai

Program			Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Daerah	Rp	4.938.101.954
Jumlah			Rp	4.938.101.954

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah	100 %
2.	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	2. Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %

Program			Anggaran	
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Rp	2.536.085.402
Jumlah			Rp	2.536.085.402

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	50 %
2.	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	2. Persentase penggunaan domain tanahloutkab.go.id	100 %
3.	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	3. Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %

Program		Anggaran	
1.	Program Aplikasi Informatika	Rp	5.536.996.792
Jumlah		Rp	5.536.996.792

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	50 %
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	2. Persentase terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut	80 %

Program		Anggaran	
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	74.910.000
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	49.990.390
Jumlah		Rp	124.900.390

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pemenuhan dokumen laporan reformasi birokrasi	1. Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	65 Berkas
		2. Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang
		3. Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan
		4. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area	8 dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.099.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.648.500
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.570.920
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.639.600
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	16.579,150
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.044.790
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		19.518.510
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		49.740.352
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		123.999.600
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		34.611.486
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		16.909.772
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		66.379.228
		Pemeliharaan Peralatan dan		8.000.000

		Mesin Lainnya	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.735,552
	Jumlah		862.293.250

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	1. Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun. 2. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun. 3. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun.	1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	4.990.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.515.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.290.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.740.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.440.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.440.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.317.776
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD		2.900.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1.140.000
		Jumlah		4.075.808.704

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan
Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan pengelolaan layanan komunikasi publik	1. Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa Daerah	500 Informasi
		2. Jumlah informasi publik yang disebarluaskan melalui media massa Daerah	300 Informasi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	199.934.566
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	117.951.776
		Jumlah		317.886.342

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Kemitraan,
Penyiaran dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik	1. Jumlah data/informasi publik yang diinformasikan melalui Radio dan website ppid	700 data/informasi
		2. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	5 Kelompok
		3. Jumlah aspirasi/pengaduan publik yang terlayani	10 Aduan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20.980.500
			Pelayanan Informasi Publik	532.982.430
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.664.236.130

	Jumlah	2.218.199.060
--	--------	---------------

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Memfasilitasi dan memberikan layanan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang E-Government di Kabupaten Tanah Laut	1. Jumlah pengelolaan Pusat Data	1 paket
		2. Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan E-government	30 SKPD
		3. Jumlah permohonan penggunaan domain tanahlautkab.go.id yang terfasilitasi	4 permohonan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Aplikasi Indormatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	2.986.679.139
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	24.650.000
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	2.165.667.654
	Jumlah			5.176.996.793

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Memfasilitasi dan memberikan layanan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut	1. Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE	2 Aplikasi
		2. Jumlah kajian Arsitektur aplikasi, data dan layanan	1 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Aplikasi Indormatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	109.999.999
			Pengelolaan Government Chief information Officer (GCIO)	250.000.000
		Jumlah		359.999.999

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Indikator pada Aplikasi Satu Data Tanah Laut	1. Jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai 2. Jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah 3. Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian Indikator/Elemen Aplikasi Satu Data Tanah Laut	1 aplikasi 1 buku 20 orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	74.910.000
		Jumlah		74.910.000

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	1. Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi 2. Jumlah aplikasi Sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat 3. Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi	20 SKPD 1 Aplikasi 1 kali

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.990.390
	Jumlah			49.990.390

F. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 36.992.776,-

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 300.000,-
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp. 2.515.000,-
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp. 2.290.000,-
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar Rp. 2.740.000,-
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebesar Rp. 2.440.000,-
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 3.440.000,-
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 23.267.776,-

- 2. Adminitasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.022.075.928,-**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 4.017.535.928,-
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD Rp. 2.900.000,-
 - c) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 500.000,-
 - d) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebesar Rp. 1.140.000,-
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 30.632.800,-**
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya sebesar Rp. 30.632.800,-
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp.0,-
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 416.410.308,-**
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 5.648.500,-
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 35.570.920,-
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 20.230.700,-
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 16.579.150,-
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebesar Rp. 338.381.038,-
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 278.676.600,-**
 - a) Pengadaan Mebel sebesar Rp. 82.799.610,-

- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 195.876.990,-
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 210.012.238,-**
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 51.401.152,-
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 123.999.600,-
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 34.611.486,-
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 118.424.552,-**
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 6.909.772,-
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan sebesar Rp. 36.379.228,-
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 23.400.000,-
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 51.735.552,-
- 8. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.218.789.432,-**
- a) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sebesar Rp. 16.762.000,-
 - b) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 199.934.566,-
 - c) Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 117.947.776,-
 - d) Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 444.854.620,-

- e) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas sebesar Rp. 2.439.290.470,-
- 9. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.728.794.139,-**
 - a) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.728.794.139,-
- 10. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.915.973.864,-**
 - a) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar Rp. 24.650.000,-
 - b) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.403.673.865,-
 - c) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar Rp. 147.999.999,-
 - d) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) sebesar Rp. 339.650.000,-
- 11. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 74.910.000,-**
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebesar Rp. 74.910.000,-
- 12. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 44.040.390,-**
 - a) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 44.040.390,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target sasaran strategis RPJMD dan perjanjian kinerja tahun 2021. Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut diukur dengan membandingkan realisasi capaian kinerja terhadap target untuk setiap indikator sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana hasil proses penyelarasan cascading kinerja oleh Tim Sakip. Regulasi kinerja dilakukan pada setiap pimpinan, mulai dari Eselon II (Kepala), Eselon III (Sekertaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi).

Dalam penyusunan penilaian kinerja, perhitungannya persentase pencapaian secara umum, menggunakan rumus pembilang (target) dibagi dengan penyebut (realisasi) dikali 100%.

1. Sasaran RPJMD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2018-2023 telah menetapkan beberapa sasaran strategis. LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran 2021 adalah Laporan Kinerja Dinas yang merupakan tahun ke ketiga dari pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan keadaan, Renstra dibuat untuk setiap sasaran dapat lebih dari satu indikator kinerja sasaran dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan indikator kinerja yang

akan dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sesuai sasaran strategis yang akan diketahui keberadaannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengelompokan Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	> 90 %	Sangat Memuaskan
II	81% - 90%	Memuaskan
III	71 % - 80 %	Sangat Baik
IV	61 % - 70 %	Baik
V	51 % - 60 %	Cukup
VI	< 50 %	Kurang

Berikut diperlihatkan tabel realisasi capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KET
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,21	3,00	2,75	91,67 %	Kategori Baik
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	17,8 %	50 %	22,5 %	45 %	
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	118,93 %	100 %	97,33 %	97,33 %	
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %	27 %	27 %	100 %	
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	2,4 %	50 %	2,4 %	4,8 %	

7	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	103 %	100 %	100 %	100 %	
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	-	82 nilai	84,05 nilai	102,5 %	Kategori BB
		Nilai SAKIP SKPD	72,58 nilai	80 nilai	77,85 nilai	97,31 %	Kategori BB
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase statistik sektoral daerah	80 %	80 %	80 %	100 %	
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN						85,33 %	Kategori Memuaskan

Hasil perhitungan persentase rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah **85,33%** dengan kategori capaian **Memuaskan**. Meskipun demikian, ada beberapa hal terkait hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus dan konsisten.

2. Eselon II (Kepala Dinas)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut dengan indikator kinerja utama Indeks SPBE, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,00	2,75	2,8

- Uraian dan Analisa Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai target Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, maka dapat dibuat tabel 3.2 mengenai Capaian Indikator Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020		2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE	2,76	3,21	3,00	2,75	Indeks

Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2021		
		2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,21	3,00	2,75	91,67 %

Gambar Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,60	Baik
2.	Pemerintah Kab. Banjar	2,43	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Tanah Laut	2,75	Baik
4.	Pemerintah Kab. Tapin	1,89	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,46	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,33	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Tabalong	2,48	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Kotabaru	1,99	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	2,50	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Balangan	1,77	Kurang
11.	Pemerintah Kota Banjarmasin	2,48	Cukup
12.	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,11	Cukup

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan e-Government, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut.

Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Penilaian SPBE tahun 2021 dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dengan jumlah Tim:

1. Koordinator : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Anggota : - Universitas Indonesia (Jakarta)
 - Universitas Gajah Mada (Yogyakarta)
 - Universitas Gunadharma (Jakarta)
 - Politeknik Elektronika (Surabaya)
 - Universitas Telkom (Bandung)

Hasil evaluasi SPBE Tahun 2021 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah sebesar 2,75 yang berarti hampir mendekati nilai target yang ditetapkan (3,00), dengan realisasi mencapai 91,67%. Nilai indeks 2,75 masuk dalam predikat baik (2,6–3,5). Tabel berikut memperlihatkan kategori nilai SPBE.

Tabel 3.4 Kategori SPBE

NO	NILAI SPBE	PRIDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – <4,2	Sangat Baik
3	2,6 – <3,5	Baik
4	1,8 – <2,6	Cukup

Penilaian SPBE didasarkan atas domain dan aspek penilaian, yang dirincikan sebagai tabel berikut.

Tabel 3.5 Domain dan Aspek Penilaian

No	DOMAIN	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	Kebijakan SPBE	- Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
		- Kebijakan Layanan SPBE	10%
2	Tata Kelola SPBE	- Kelembagaan	8%

		- Strategi dan Perencanaan	8%
		- Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
3	Layanan SPBE	- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
		- Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Indeks SPBE tahun 2021 adalah 2,75 sedang pada tahun 2020 adalah 3,21 dan tahun 2019 adalah 2.76 sedangkan pada awal penilaian tahun 2018 adalah 1,42, artinya indeks SPBE mengalami peningkatan atau semakin baik per tahunnya. Peningkatan tersebut cukup signifikan dari tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan nilai namun masih dalam kategori baik, penurunan nilai disebabkan bertambahnya indikator penilaian SPBE dari tahun sebelumnya. Nilai SPBE yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 2,75 ini jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar 2,8 maka ada selisih nilai 0,05, yang artinya meskipun belum tercapai sesuai target akhir Renstra namun selisih yang ada cukup kecil sehingga masih dapat ditingkatkan untuk penilaian indeks SPBE di tahun kedepannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dapat dilihat bahwa indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut adalah 2,75

dengan predikat baik. Indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga melebihi indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 2,60 (predikat baik). Meskipun demikian, seluruh pimpinan dan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diinstruksikan agar meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dengan nilai 2,75 bila dibandingkan dengan Indeks SPBE Tahun 2020 dengan Nilai 3,21 mengalami penurunan 0,46 angka. Penurunan disebabkan adanya penambahan indikator penilaian pada tahun ini, namun dengan perolehan 2,75 masih dalam predikat baik yang merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi seluruh unit-unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Berbagai upaya yang dilakukan dengan membentuk Tim Evaluasi Internal Penilaian Mandiri SPBE di Kabupaten Tanah Laut, menyusun aktualisasi pelaksanaan SPBE, menentukan target indikator untuk dipenuhi, menyusun rencana aksi dan tindak lanjut sosialisasi, melakukan kegiatan teknis penunjang SPBE seperti integrasi berbagai aplikasi, penyediaan/fasilitasi sarana/prasarana komunikasi dan informasi, peningkatan layanan publik, peningkatan SDM aparatur, dan lain-lain.

Hal yang paling penting tercapainya target dan peningkatan SPBE adalah komitmen pimpinan (Bupati) yang sangat tinggi, sehingga memacu SKPD lain untuk lebih serius dan aktif mengimplementasikan SPBE. Akhirnya koordinasi dan kerja sama dapat terjalin dengan baik antar SKPD.

Selanjutnya untuk dapat lebih meningkatkan SPBE di tahun mendatang, beberapa hal rekomendasi di bawah ini agar dapat dilakukan, yaitu: perlunya peningkatan aplikasi-aplikasi Layanan Publik menuju Integrasi Layanan antar OPD dan dengan provinsi dan pusat, perlunya pengembangan pusat data dan peletakan server semua OPD di pusat data dan SOP pemanfaatan pusat data oleh semua OPD, perlunya pembuatan dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang lengkap dan mencakup semua OPD.

3. Eselon III (Sekretaris)

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Sekretaris tahun 2021.

Tabel 3.21 Hasil capaian realisasi sasaran 3.3 dan 3.4

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	3.3 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2	3.4 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	82 nilai	84,05 nilai	102,5%	86 nilai
		Nilai SAKIP SKPD	80 nilai	77,85 nilai	97,31%	82 nilai
Rata-Rata Capaian					99,94 %	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2021		
		2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai RB SKPD	-	82 nilai	84,05 nilai	102,5%
	Nilai SAKIP SKPD	72,58 nilai	80 nilai	77,85 nilai	97,31%
Rata-rata Capaian					99,94%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 99,94%. Dari 3 indikator kinerja, indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka telah tercapai 100% sesuai dengan target. Untuk indikator nilai RB (Reformasi Birokrasi) tercapai nilai 84,05 yang jika dibandingkan dengan target nilai 82, maka diperoleh persentase 102,5% sedang nilai SAKIP SKPD hanya tercapai dengan nilai 77,85 dari target tahun 2021 nilai 80, yang disebabkan masih banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga persentase capaian nilai SAKIP SKPD adalah 97,31 %. Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka masih kurang 4,15 yang artinya proses pelaksanaan SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut masih harus ditingkatkan agar target akhir Renstra dapat tercapai.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2020 yang terdiri dari indikator persentase tata kelola administrasi umum

dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 100% pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 realisasinya juga 100%. Indikator persentase indikator nilai RB SKPD diperoleh dengan nilai 84,05 dengan kategori baik, sedang nilai SAKIP SKPD juga telah terealisasi dengan nilai 77,85 dengan target nilai 80 sehingga persentase tercapaian pada 97,31%.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu**

Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 telah mencapai 100% dari target yang ada yaitu sebanyak 65 berkas yang terdiri atas 29 berkas urusan umum dan 36 berkas urusan kepegawaian. Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian. Strategi kedepannya ialah perlunya penambahan tenaga personil kepegawaian untuk membantu urusan kepegawaian dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

- **Nilai RB SKPD**

Nilai RB SKPD di tahun 2020 yang dievaluasi tahun 2021 hasil evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Tanah Laut diperoleh nilai 84,05 dari target 82. Hasil penilaian terhadap Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 menunjukkan berada pada nilai 30,51 (**84,06**), kategori

Sangat Baik. Nilai ini merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen pengungkit yang terdiri dari 8 (delapan) area pemenuhan dan 8 (delapan) area reform.

Pelaksanaan PMPRB Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dimulai pada bulan Juni 2021, setelah sebelumnya ada perpanjangan waktu penilaian dari Kementerian PAN dan RB yang semula batas akhir input online pada 30 April menjadi 16 Juli 2021. Pada tahapan ini telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Rapat koordinasi dengan SKPD terkait, dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Instrumen dari Kementerian PANRB;
2. Penilaian *offline*. Pada tahapan ini asesor bersama dengan tim pelaksana SKPD melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi RB yang merupakan format dari Kementerian PAN dan RB.
3. Reviu LKE RB. Tahapan ini dilaksanakan bersamaan dengan finalisasi evaluasi pelaksanaan RB. Pada tahapan ini Lembar Kerja Evaluasi RB yang telah diisi dilakukan reviu oleh tim Inspektorat. Reviu ini untuk melihat kesesuaian antara data dukung dengan hasil penilaian RB yang dilakukan.
4. Penilaian *online*. Pada tahapan ini hasil penilaian *offline* yang telah dilakukan oleh Tim Asesor PMPRB diinput ke dalam aplikasi *online* PMPRB Kementerian PAN dan RB.
5. Pengiriman Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB kepada Kementerian PANRB dengan melakukan *SUBMIT* melalui aplikasi PMPRB *online*. Pada tahapan ini diharapkan seluruh hasil penilaian yang telah diinput

ke dalam aplikasi *online* dikirim akan dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menilai implementasi RB SKPD dan kesesuaian data dukungannya.

Dari hasil Pelaksanaan PMPRB Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Laut sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat diperoleh nilai sebagai berikut :

Nomor	Komponen/Sub Komponen	Hasil Penilaian	
		Nilai	%
A	PEMENUHAN (14,60)		
1	Manajemen Perubahan (2)	1,80	90
2	Deregulasi Kebijakan (1)	1,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (2)	1,00	50
4	Penataan Tatalaksana (1)	0,73	73
5	Penataan Manajemen SDM (1,40)	1,33	95
6	Penguatan Akuntabilitas (2,5)	2,25	90
7	Penguatan Pengawasan (2,2)	1,62	74
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5)	1,87	75
	SUB TOTAL	11,60	79,47
B	REFORM (21,70)		
1	Manajemen Perubahan (3)	3,00	100
2	Deregulasi Kebijakan (2)	2,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (1,5)	0,00	0
4	Penataan Tatalaksana (3,75)	3,42	91
5	Penataan Sistem Manajemen SDM (2)	1,50	75
6	Penguatan Akuntabilitas (3,75)	3,30	88
7	Penguatan Pengawasan (1,95)	1,95	100
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75)	3,75	100

	SUB TOTAL	18,91	87,15
	TOTAL	30,51	84,06

1. Komponen Pemenuhan

Komponen Pemenuhan dinilai berdasarkan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Asesor. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh Kementerian PAN dan RB. Delapan area perubahan yang dinilai tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Manajemen Perubahan (2%)

Penilaian manajemen perubahan dalam melakukan reformasi internal diukur dari 4 (empat) indikator, yaitu Tim Reformasi Birokrasi, Road Map RB, Pemantauan dan Evaluasi, serta Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,80 (90%).

b. Deregulasi Kebijakan (1%)

Penilaian untuk area perubahan Deregulasi Kebijakan dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Harmonisasi. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,00 (100%).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi (2%)

Penataan dan penguatan dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu evaluasi Kelembagaan dan Tindak Lanjut Evaluasi. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,00 (50%).

d. Penataan Tata Laksana (1%)

Penataan Tata Laksana memiliki 2 (dua) indikator yaitu Proses Bisnis dan Prosedur Operasional tetap (SOP) dan Keterbukaan Informasi Publik. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 0,73 (73%).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM (1,40%)

Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki 6 (enam) indikator antara lain Perencanaan kebutuhan pegawai, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu, Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem Informasi Kepegawaian. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,33 (95%).

f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%)

Penilaian pada area Penguatan Akuntabilitas meliputi 2 (dua) indikator antara lain Keterlibatan pimpinan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 2,25 (**90%**).

g. Penguatan Pengawasan (2,2%)

Penilaian pada area Penguatan Pengawasan meliputi 6 (enam) indikator antara lain Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle-Blowing System*, Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 1,62 (74%).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)

Penilaian pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi 5 (lima) indikator antara lain Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian kepuasan terhadap pelayanan,

Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,87 (75%).

2. Komponen Reform

Komponen Reform dinilai berdasarkan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Asesor. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh Kementerian PAN dan RB. Delapan area perubahan yang dinilai tersebut adalah Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Manajemen Perubahan (3%)

Penilaian manajemen perubahan dalam area reform diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu Komitmen dalam Perubahan, Komitmen Pimpinan, serta Membangun Budaya Kerja. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 3,00 (100%).

b. Deregulasi Kebijakan (2%)

Penilaian untuk area Deregulasi Kebijakan pada reform dilihat dari indikator Peran Kebijakan. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 2,00 (100%).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi (1,5%)

Penilaian untuk area Penataan dan Penguatan Organisasi pada reform dilihat dari indikator Organisasi Berbasis Kinerja. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 0,00 (0%).

d. Penataan Tata Laksana (3,75%)

Penataan Tata Laksana memiliki 3 (tiga) indikator yaitu Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan

Jabatan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi, dan Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat. Hasil Penilaian Mandiri pada area ini sebesar 3,42 (91%).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM (2%)

Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki 3 (tiga) indikator antara lain Kinerja individu, *Assessment* Pegawai dan Pelanggaran Disiplin Pegawai. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,50 (75%).

f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%)

Penilaian pada area Penguatan Akuntabilitas meliputi 4 (empat) indikator antara lain Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja, Pemberian *Reward and Punishment* dan Kerangka Logis Kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 3,30 (88%).

g. Penguatan Pengawasan (1,95%)

Penilaian pada area Penguatan Pengawasan meliputi 3 (tiga) indikator antara lain Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,95 (100%).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)

Penilaian pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi 5 (lima) indikator antara lain Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 3,75 (100%).

Rencana tindak lanjut disusun setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB *unevaluated*). Rencana tindak lanjut tersebut menjadi komitmen manajemen organisasi sebagai penanggungjawab area perubahan untuk menjamin perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan SKPD guna mendukung Pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode berikutnya.

- **Nilai SAKIP SKPD**

Nilai SAKIP SKPD di tahun 2020 yang dievaluasi tahun 2021 hasil evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh nilai 77,85 (kategori BB) dari target nilai yang ada 80 dengan persentase capaian 97,31%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Dari hasil evaluasi direkomendasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Terhadap dokumen perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan agar dipertahankan, dan digunakan sebagai dasar penetapan perencanaan anggaran tahunan.

b. Pengukuran Kinerja

Pencapaian target IKU dapat dimanfaatkan dalam penilaian kinerja yang mengarah pada penilaian prestasi kinerja individu, dan pemberian *reward* dan *punishment* serta promosi jabatan.

c. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya;
- Agar lebih meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan

organisas, untuk peningkatan kinerja serta untuk penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

- Evaluasi program agar memuat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program dan analisis tentang perubahan target kegiatan yang dituju oleh program;
- Hasil evaluasi internal yang dilakukan pada setiap periode/bulanan/triwulan agar dimanfaatkan dalam menilai keberhasilan program.

e. Pencapaian Kinerja

- Mempertahankan/meningkatkan pencapaian target kinerja;
- Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan agar informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

d) *Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Pengelolaan administrasi umum.
2. Pengelolaan data kepegawaian.
3. Pengelolaan kehadiran dan kedisiplinan pegawai.
4. Pengelolaan data aset dan BMD pada dinas.
5. Pelayanan persuratan dinas.
6. Pengelolaan administrasi keuangan.
7. Pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.828.366.298,- dari pagu program Rp 5.113.225.202,- dengan persentase capaian 74,87 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.284.858.904,-.

f) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebanyak 7 orang PNS yang terdiri dari Kepala Dinas, Plt. Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan 3 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 6 orang tenaga kontrak (PTT). Keberhasilan capaian program pada Sekretariat didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian.
- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sekretariat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di sekretariat yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.

g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran program untuk sekretariat Dinas Kominfo sebagian besar ditargetkan pada awal triwulan I sampai dengan triwulan III karena merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- Rencana aksi kinerja untuk sekretariat Dinas Kominfo juga sebagian besar ditargetkan di awal triwulan I dan II menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran program.

h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Sekretariat, diantaranya:

- Kurangnya SDM personil yang ada pada Sekretariat Dinas Kominfo
- Belum optimalnya monitoring program kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan kinerja.
- Kurangnya data dukung administratif atau dokumentasi program kegiatan yang dilaksanakan sehingga mempersulit dalam penyusunan laporan akhir.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan atau diklat terkait.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala per triwulan
- Melakukan pengumpulan data dukung secara intensif sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan akhir.

4. Eselon III (Kepala Bidang)

4.1 Kepala Bidang Komunikasi

Tabel 3.8 Hasil capaian realisasi sasaran 1.1 dan 1.2

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100%	100%	100%	100%
2	1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%	27%

	Teknologi Informasi					
Rata-Rata Capaian					100%	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2021		
		2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase informasi yang disebarakan	118,93%	100%	97,33%	97,33%
2.	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	100%	27%	27%	100%
Rata-rata Capaian					98,67%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja bidang pengelolaan komunikasi adalah 98,67% dari 2 indikator kinerja, indikator persentase informasi yang disebarakan telah tercapai 97,33% dari target 100% tahun 2021, dan indikator lainnya juga telah tercapai 27% dari target tahun 2021 (27%) sehingga pencapaiannya adalah 100%. Persentase informasi yang disebarakan pada tahun 2021 sebesar 97,33% yang jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni 100%, maka terdapat selisih 2,67% sehingga masih harus ditingkatkan kinerjanya agar dapat tercapai sesuai target akhir. Sedang pada persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2020 yang terdiri dari indikator persentase informasi yang telah disebarakan telah tercapai 97,33% dari target 100 % pada tahun 2021 sedang pada tahun 2020 sebelumnya capaian melebihi target 100% yakni 118,93%. Sedangkan pada indikator Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi juga telah terealisasi 27% dengan target 27% sehingga tercapai 100%.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase Informasi yang Disebarakan

Persentase informasi yang disebarakan oleh Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 dicapai angka 97,33% dari target capaian 100%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah informasi yang disebarakan sebanyak 1.460 data/informasi dibagi data informasi yang harus disebarakan sebanyak 1500 data/informasi target dalam setahun pelaksanaan kegiatan. Capaian 1460 data/informasi tersebut terdiri atas Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website Tanah Laut sebanyak 760 informasi dan Jumlah data/informasi publik melalui website PPID Kabupaten Tanah Laut sebanyak 188 informasi dan melalui radio Tuntung Pandang FM sebanyak 512 informasi. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran informasi tersebut selain melalui website Tanah Laut dan PPID Tanah Laut juga disebarakan melalui media lainnya seperti Radio Tuntung Pandang FM, media cetak dan media sosial serta melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dalam pengelolaan informasi, yang semuanya telah dilaksanakan pada tahun berkenaan, namun dalam hal penyebaran

informasi tersebut harus dilakukan melalui proses analisa dan identifikasi serta klasifikasi atas data/informasi yang akan disebarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terlebih dahulu, dengan tujuan menjaga kebenaran dan akurasi data/informasi tersebut. Seluruh pencapaian atas target indikator ini dapat tercapai atas hasil kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung terlaksananya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.

d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Forum konsultasi publik melalui siaran radio pada program dialog interaktif dalam program Tanah Laut Menyapa, Pojok IKM, Halo Dokter, Halo Polisi dengan menghadirkan narasumber dari SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat.
3. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui pelatihan pembuatan media publikasi berupa blogspot, dan pelatihan tata cara penulisan berita dan pengambilan foto untuk konten publikasi.
4. Penyebarluasan informasi melalui media sosial fanpage Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, portal website Tanah Laut di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut www.tanahlautkab.go.id.
5. Pro-Aktif dalam penyebarluaskan informasi valid dan cegah isu *hoax* virus corona melalui media pemerintah daerah.
6. Peningkatan fasilitas ruangan Radio beserta peralatan penunjangnya.

7. Pengelolaan aplikasi e-lapor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Komunikasi telah terlaksana secara keseluruhan pada satu buah program, yaitu program pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.918.423.057,- dari pagu program Rp 3.218.789.432,- dengan persentase capaian 90,19 %, terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 300.366.375,-.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Komunikasi tahun 2021 sebanyak 5 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Komunikasi, 2 orang kasi dan 2 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 11 orang tenaga kontrak (PTT) yang terdiri dari 5 orang jurnalis, 5 tenaga penyiar dan 1 orang tenaga administrasi. Keberhasilan capaian program pada Bidang Komunikasi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah dikelola cukup baik oleh sebagian besar perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Menghadirkan narasumber dari SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat untuk mengisi program forum konsultasi publik melalui siaran radio.
- Peningkatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

- Peningkatan SDM pada bidang komunikasi dalam pengelolaan informasi melalui media sosial dan media online lainnya.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di bidang Komunikasi yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.
- Meningkatkan kapasitas-kapasitas personil lapangan dalam melakukan peliputan lapangan.

g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada Bidang Komunikasi dengan program pengelolaan komunikasi dan informasi publik disusun dengan target penggunaan anggaran pada triwulan I 20%, Triwulan II 20%, triwulan III 30% dan triwulan IV 30%.
- Rencana aksi kinerja pada Bidang Komunikasi dengan target kinerja persentase informasi yang disebarakan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran yakni triwulan I 20%, Triwulan II 20%, triwulan III 30% dan triwulan IV 30%.

h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Bidang Komunikasi, diantaranya:

- Kurangnya personil lapangan maupun administratif yang ada pada Bidang Komunikasi.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis pengelolaan informasi publik.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan informasi publik

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis jurnalis dan tenaga teknologi informatika pada bidang komunikasi.
- Peningkatan SDM kepegawaian melalui pelatihan atau diklat terkait pengelolaan informasi publik.

1.2 Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Tabel 3.13 Hasil capaian realisasi sasaran 3.1 dan 2.1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	3.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	50 %	22,5%	45%	100%
		Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%	100%
2.	2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					81,67%	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2021		
		2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	17,8%	50%	22,5%	45%
2.	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					81,67%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja bidang penyelenggaraan e-government telah terealisasi 81,67%. Pada indikator kinerja persentase SKPD yang menerapkan SPBE hanya tercapai 22,5% dari target tahun 2021 (50%) sehingga persentase capaiannya hanya 45%. Untuk indikator persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id dengan target 100% telah tercapai 100%, dan pada indikator kinerja Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% dengan target 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka nilai persentase SKPD yang menerapkan SPBE yang hanya tercapai 45% maka terdapat selisih 55% yang artinya kedepannya harus lebih ditingkatkan kinerjanya dalam pencapaian target akhir, sedangkan pada indikator persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id dan persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga kedepannya harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan target tahun 2021 dengan 2020 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang menerapkan SPBE telah tercapai 22,5% pada tahun 2021 sedangkan capaian pada tahun 2020 tercapai 17,8%, terjadi peningkatan capaian yang sebesar 4,7% dibandingkan realisasi tahun 2020. Sedangkan pada indikator Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id telah terealisasi 100% dengan target 100% sehingga tercapai 100% seperti halnya pada tahun 2020. Pada indikator kinerja Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% dengan target 100% pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 juga telah tercapai 100%.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Persentase SKPD yang menerapkan SPBE**

Persentase SKPD yang menerapkan SPBE yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 telah tercapai 22,5% dari target 50% dengan persentase capaian 45% dibandingkan tahun 2020 yang tercapai 17,8 % dari target 25% dengan persentase capaian 71,2% dari target yang ada. Data tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah SKPD yang menerapkan e-government dibagi jumlah SKPD yang ada (berjumlah 40). Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan sembilan SKPD dalam penerapan SPBE dalam pelayanannya yaitu BKPSDM, Bapenda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Penerapan SPBE baru mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2018 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal. Pada tahun 2019 dan 2020 mulai meningkat, proses pencapaian tersebut didukung dengan baik oleh Kepala Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut, sehingga SKPD dapat meningkatkan pemahaman tentang perlunya Penerapan SPBE. Keberhasilan capaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dari seluruh instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

guna menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah guna menghadapi era digital yang terus berkembang. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah kurangnya infrastruktur TIK dan belum terintegrasinya jaringan antar SKPD sehingga pencapaian belum maksimal. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPBE tersebut dalam bentuk konsultasi/koordinasi dan juga pemberian rekomendasi pembuatan jaringan dan perangkat yang diperlukan oleh SKPD dalam penerapan SPBE. Untuk kedepannya perlu diadakan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang SPBE tersebut serta melakukan koordinasi secara langsung terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi dalam indikator SPBE.

- **Persentase Penggunaan Domain tanahlautkab.go.id**

Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 telah tercapai 100% dari target 100% dengan persentase capaian 100% dibandingkan tahun 2020 yang juga telah tercapai 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100%.

- **Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi**

Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 telah mencapai 100% dari target yang ada. Persentase capaian dihitung dari jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dibagi jumlah permohonan SKPD

dikali 100%. Ada lima buah SKPD yang memohon fasilitasi dan dari semua permohonan tersebut telah diproses sesuai permohonan yaitu dari Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Permohonan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Permohonan Rekomendasi Pembuatan Aplikasi); Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Permohonan Layanan Cloud & Subdomain "jdih.tanahlautkab.go.id" dan Mohon Fasilitasi Pembuatan Sistem Informasi Tanda Pengenal (Sintal); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Permohonan Dukungan Teknis Pengembangan Aplikasi); Kecamatan Bumi Makmur (Permohonan Penggantian Website Kecamatan); Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (Permohonan Rekomendasi Pembuatan Aplikasi Simtaru dan IP *Public* Serta Server Pendukung). Proses fasilitasi dilakukan melalui surat permohonan dari SKPD yang bersangkutan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian didisposisi oleh Kepala Dinas kepada Bidang Penyelenggaraan E-Government untuk diproses dan ditindaklanjuti. Strategi kedepannya ialah perlunya menyediakan layanan terpadu satu pintu pada setiap surat permohonan yang masuk kepada Dinas melalui online dan menyiapkan penjadwalan petugas informasi guna pelayanan e-government yang lebih baik.

d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Penyediaan layanan internet dan layanan data terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
2. Penyediaan layanan internet gratis di fasilitas umum di wilayah Pelaihari.
3. Penyediaan layanan-layanan terkait teknologi dan informasi bagi seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah

- Laut diantaranya pengembangan aplikasi, jaringan, integrasi data, layanan *hosting*, *colocation server* dan digitalisasi.
4. Peningkatan peralatan penunjang kerja bagi aparatur guna pengoptimalan kinerja.
 5. Kerjasama Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government.
 6. Penyediaan fasilitas video conference bagi pimpinan dan SKPD di Lingkup Kabupaten Tanah Laut.
 7. Pengelolaan jaringan fiber optik dan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 8. Pembuatan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
 9. Peningkatan SDM aparatur dengan mengadakan diklat intern urusan teknologi informasi.
 10. Pengelolaan *Network Operation Center* (NOC) beserta fasilitas penunjangnya.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyelenggaraan E-Government hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program aplikasi informatika dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.368.262.244,- dari pagu program Rp 4.644.768.003,- dengan persentase capaian 94,05 %. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 148.377.272,-.

f) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Penyelenggaraan E-Government tahun 2021 sebanyak 4 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Penyelenggaraan E-Government, 1 orang kasi yang merangkap pelaksana tugas (plt) dan 2 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 5 orang tenaga kontrak (PTT) yang terdiri dari 2 orang tenaga pengelola aplikasi. 2

tenaga pengelola jaringan dan 1 orang tenaga administrasi. Keberhasilan capaian program pada Bidang Penyelenggaraan *e-government* didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pelaksanaan pemenuhan indikator penunjang penilaian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang telah dikelola dengan cukup baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- Dukungan langsung dari Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas dalam memberikan arahan dan masukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Tanah Laut.
- Peningkatan SDM pada bidang Penyelenggaraan *E-Government* dalam pengelolaan sistem jaringan dan aplikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Kerjasama yang baik dari Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan *e-government*.

g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada bidang Penyelenggaraan *E-Government* pada program Aplikasi Informatika sebagian besar disusun pada triwulan I 75%, triwulan II 10%, triwulan III 10% dan triwulan IV 5%.
- Rencana aksi kinerja pada bidang Penyelenggaraan *E-Government* pada program Aplikasi Informatika dengan target kinerja Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan II 10%, triwulan III 20% dan triwulan IV 20% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Bidang penyelenggaraan *E-Government* yang memiliki sertifikat di Bidang TIK.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta aplikasi pada *Network Operation Center (NOC)*.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta aplikasi.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Teknologi Informatika pada bidang penyelenggaraan *E-Government*.
- Peningkatan SDM kepegawaian melalui pelatihan atau diklat terkait pengelolaan Teknologi Informasi.
- Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang SPBE dan koordinasi secara langsung terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi dalam indikator SPBE.

1.3 Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Tabel 3.17 Hasil capaian realisasi sasaran 1.3 dan 3.5

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	50%	2,4%	4,8%	100%
2	5.3 Meningkatnya kualitas data sektoral daerah	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					52,4%	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TAHUN 2021		
		2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	2,4%	50%	2,4%	4,8%
2.	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	80%	100%
Rata-rata Capaian					52,4%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja bidang Statistik dan Persandian telah terealisasi 52,4%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik hanya tercapai 2,4 % dengan target 50% tahun 2021 sehingga persentase capaiannya hanya 4,8%. Untuk 1 indikator lainnya telah tercapai 80% dari target tahun 2020 (80%), sehingga persentase capaiannya 100%. Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik yang diperoleh tahun 2021 hanya sebesar 4,8% jika dibandingkan target akhir Renstra 100% maka terdapat selisih 95,2 persen yang artinya ditahun ke depannya harus ditingkatkan kinerjanya karena masih sangat jauh dari target. Sedangkan pada persentase statistik sektoral tahun 2021 telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2020 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik hanya tercapai 2,4% pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 kegiatan ini hanya tercapai 2,4% dengan target 50% sehingga persentase capaiannya hanya 4,8%. Sedangkan pada indikator Persentase statistik sektoral telah terealisasi 80% dengan target 80% sehingga tercapai 100%.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik

Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 hanya mencapai 2,4% dari target yang 50%. Hal ini disebabkan pemanfaatan persandian baru dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal sedang pada tahun 2020 terkait tanda tangan elektronik sudah dalam tahapan pengusulan ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah mengupayakan tanda tangan elektronik ini agar dapat diterapkan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan dukungan dari Kepala Daerah serta kerja sama yang solid antar SKPD agar dapat tercapai dengan baik guna menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi persandian/keamanan informasi diterapkan

dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen/informasi/data elektronik. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah transformasi persandian yang semula hanya mengurus keamanan informasi rahasia (santel) menjadi kegiatan keamanan informasi secara keseluruhan belum tersosialisasikan dengan baik. Pengamanan informasi harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat, sehingga sumber daya yang ada dapat menyesuaikan dengan isu-isu teknologi terkini. Strategi kedepan ialah perlunya penambahan personil bidang keamanan informasi dan keamanan siber, maupun adanya pelatihan/bimbingan teknis/koordinasi tentang keamanan informasi dengan instansi-instansi terkait.

- **Persentase statistik sektoral daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian dalam pencapaian Persentase statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 telah mencapai 80% dari target yang ada dengan persentase capaian 100%. Semua SKPD telah melakukan input indikator data pada aplikasi Satu Data Tanah Laut sehingga target telah tercapai 80 %. Aplikasi Satu Data perlu dikembangkan/update sistem untuk dapat lebih banyak melakukan input data terhadap indikator-indikator yang harus terisi datanya. Kendala dalam pelaksanaannya ialah setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data. Langkah kedepan perlu pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut untuk menunjang kegiatan penyusunan profil daerah yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala.

d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Focus Group Discussion (FGD) dalam pengelolaan data statistik.
2. Sosialisasi Satu Data Tanah Laut ke SKPD di Lingkup Pemkab Tanah Laut.
3. Pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data.
4. Pengembangan dan update aplikasi Satu Data Tanah Laut.
5. Koordinasi terkait program kegiatan bidang statistik dan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pencetakan Buku Ikhtisar Statistik Sektor Kabupaten Tanah Laut.
7. Berkoordinasi dengan kantor BPS Kabupaten Tanah Laut.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Statistik dan Persandian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.345.000,- dari pagu program Rp 74.910.000,- dengan persentase capaian 67,21 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 24.565.000,- sedangkan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32.175.000,- dari pagu program Rp 44.040.390,- dengan persentase capaian 73,06 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 11.865.390,-.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Statistik dan Persandian tahun 2021 sebanyak 3 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Statistik dan Persandian, 1 orang Kasi Pengelolaan Statistik, dan 1 orang Kasi Persandian, Keamanan Informasi dan

telekomunikasi. Tidak ada tenaga pendukung baik staf pelaksana maupun tenaga kontrak namun masih dapat memperoleh pencapaian yang cukup baik. Keberhasilan capaian program pada Bidang Statistik dan Persandian didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Koordinasi intensif antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pengisian indikator statistik sektoral melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut.
- Tahap awal pengusulan pemanfaatan persandian dengan menggunakan tanda tangan elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada bidang Statistik dan Persandian pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral disusun pada Triwulan I 10%, triwulan II 70% dan triwulan IV 20%; program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi disusun pada Triwulan I 100%.
- Rencana aksi kinerja pada bidang Statistik dan Persandian pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan target kinerja Persentase Statistik sektoral daerah sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 10%, triwulan II 70% dan triwulan IV 20% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sedangkan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target kinerja Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 50% sesuai dengan ketersediaan anggaran.

h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Bidang Persandian dan Statistik, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Bidang Statistik dan Persandian khususnya untuk jabatan fungsional Sandiman maupun operator Sandi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis persandian dan keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Belum tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Persandian dan keamanan informasi pada bidang Statistik dan Persandian.
- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait Persandian dan Keamanan Informasi.
- Melakukan sosialisasi tentang Persandian dan pentingnya keamanan informasi.
- Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Peningkatan SDM admin setiap SKPD dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
- Pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara

berkala oleh produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)

5.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta aset daerah	Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	65 berkas	65 berkas	100 %	65 berkas
		Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	0 orang	0 orang	0%	10 orang
		Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area	8 dokumen	8 dokumen	100 %	8 dokumen
Rata-Rata Capaian					75 %	

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2021 sebesar 75%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 4 indikator. Pada indikator jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas tercapai 65 berkas yang terdiri atas 29 berkas urusan umum dan 36 berkas urusan kepegawaian. Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 0 orang

dengan hasil 0 orang karena adanya penundaan pelaksanaan diklat yang anggarannya dilakukan pergeseran untuk kegiatan yang lain. Indikator jumlah laporan pengelolaan aset daerah dengan target 2 laporan yaitu laporan pengelolaan belanja modal dan laporan pengelolaan barang habis pakai telah tercapai 100%. Indikator jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area telah tercapai seluruh area perubahan pada 8 dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi.

b) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi**

Indikator jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas realisasinya yaitu 65 berkas yang diperoleh dari urusan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan ASN yang dilayani secara tertib dengan target 100%, nilai realisasinya yaitu 100%. Dalam rangka mengupayakan peningkatan layanan administrasi umum pada Dinas Kominfo maka dilaksanakan penandatanganan komitmen integritas bersama.



Gambar Komitmen bersama dalam upaya peningkatan layanan administrasi umum pada Dinas Kominfo

- **Jumlah Jumlah Kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal**

Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 0 orang realisasinya yaitu 0 orang dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan kurangnya minat ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mengajukan diklat dan bimtek secara luring pada tahun 2021 sehingga anggarannya dilakukan pergeseran untuk membiayai belanja kegiatan yang lain, namun ada solusi bagi beberapa ASN yang tetap ingin mengikuti diklat yaitu diklat secara virtual atau online.

- **Jumlah laporan pengelolaan aset daerah**

Terealisasi sebanyak 2 laporan dengan target 2 laporan, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Laporan pengelolaan belanja modal dinas dan laporan pengelolaan barang habis pakai yang dibuat per triwulan untuk direkap selama satu tahun. Keberhasilan ini dicapai dengan pelaksanaan pengelolaan aset-aset daerah dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan rencana anggaran kas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- **Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area**

Pada Tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 8 dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area dengan target 8 dokumen laporan, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. 8 dokumen area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi

tersebut terdiri dari 1) Manajemen perubahan; 2) Deregulasi kebijakan; 3) Penataan dan penguatan organisasi; 4) Penataan tata laksana; 5) Penataan manajemen SDM; 6) Penguatan akuntabilitas; 7) Penguatan pengawasan; dan 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

c) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum bagi Dinas.
2. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian.
3. Melaksanakan pengelolaan data aset dan BMD pada dinas.
4. Melaksanakan pelayanan persuratan dinas.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas.

d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Umum dan Kepegawaian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 27.524.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 30.632.800,- dengan persentase capaian

89,85 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 3.108.800,-.

2. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.402.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 5.648.500,- dengan persentase capaian 91,09 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.246.500,-.
3. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.500.750,- dari pagu sub kegiatan Rp 35.570.920,- dengan persentase capaian 63,26 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 13.070.170,-.
4. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.228.200,- dari pagu sub kegiatan Rp 20.230.700,- dengan persentase capaian 99,99 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.500,-.
5. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.894.600,- dari pagu sub kegiatan Rp 16.579.150,- dengan persentase capaian 41,59 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 9.684.550,-.
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar

Rp 326.269.542,- dari pagu sub kegiatan Rp 338.381.038,- dengan persentase capaian 96,42 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 12.111.496,-.

7. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 60.759.436,- dari pagu sub kegiatan Rp 82.799.610,- dengan persentase capaian 73,38 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 22.040.174,-.
8. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 192.030.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 195.876.990,- dengan persentase capaian 98,04 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 3.846.990,-.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.179.324,- dari pagu sub kegiatan Rp 51.401.152,- dengan persentase capaian 95,68 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.221.828,-.
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 71.807.522,- dari pagu sub kegiatan Rp 123.999.600,- dengan persentase capaian

57,91 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 52.192.078,-.

11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 34.529.296,- dari pagu sub kegiatan Rp 34.611.486,- dengan persentase capaian 99,76 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 52.192.078,-.
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.052.500,- dari pagu sub kegiatan Rp 6.909.772,- dengan persentase capaian 87,59 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 857.272,-.
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.588.700,- dari pagu sub kegiatan Rp 36.379.228,- dengan persentase capaian 84,08 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 5.790.528,-.
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.400.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 23.400.000,- dengan

persentase capaian 100 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 0,-.

15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.280.852,- dari pagu sub kegiatan Rp 51.735.552,- dengan persentase capaian 99,12 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 454.700,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kesadaran dan kedisiplinan para ASN dan Pegawai Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melengkapi dokumen administrasi umum dan kepegawaian.

f) *Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagian besar dianggarkan pada Triwulan I 50% dan triwulan II 50%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada kegiatan untuk operasional rutin kantor sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 50% dan triwulan II 50% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

g) *Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diantaranya:

- Kurangnya personil untuk mengelola data administrasi umum dan kepegawaian
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada di sekretariat.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil baik PNS maupun tenaga kontrak.
- Pemanfaatan sistem informasi persuratan untuk memudahkan penataan surat-menyurat.
- Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum guna peningkatan kinerja dinas.
- Menyiapkan sarana-prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada dinas.

5.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSentase CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan serta pelaporan kinerja dinas	Jumlah dokumen perencanaan dinas	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen
Rata-Rata Capaian					100 %	

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 3 indikator. Pada indikator jumlah dokumen perencanaan dinas dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen yang terdiri atas dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT); Indikator jumlah dokumen penganggaran yang tersusun dengan target 4 dokumen dengan hasil tercapai 4 dokumen yaitu dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2021. Indikator jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun dengan target 1 dokumen laporan yaitu dokumen laporan akhir tahun 2021 sebanyak 1 dokumen sehingga tercapai 100%.

b) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

i. Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun

Terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan target 1 dokumen, yang berarti telah terealisasi 100%. Dokumen tersebut yaitu dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2021. Tersedianya dokumen perencanaan dinas sebagai bagian administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan.

ii. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun

Terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan target 4 dokumen, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen penganggaran dinas yaitu dokumen dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana

Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun berkenaan.

iii. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun

Terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan target 1 dokumen yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen laporan kinerja tersebut merupakan laporan kinerja akhir tahun yang berisi realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD.
2. Melaksanakan pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik dengan anggaran sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- dari pagu sub kegiatan Rp 300.000,- dengan persentase capaian 0 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 300.000,-.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp

1.900.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 2.515.000,- dengan persentase capaian 75,55 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 615.000,-.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 100.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 2.290.000,- dengan persentase capaian 4,37 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.190.000,-.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.032.500,- dari pagu sub kegiatan Rp 2.740.000,- dengan persentase capaian 37,68 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.707.500,-.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 807.500,- dari pagu sub kegiatan Rp 2.440.000,- dengan persentase capaian 33,09 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.632.500,-.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.212.500,- dari pagu sub kegiatan Rp 3.440.000,- dengan persentase capaian

64,32 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.227.500,-.

7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.100.976,- dari pagu sub kegiatan Rp 23.267.776,- dengan persentase capaian 99,28 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 166.800,-.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 1.740.901,- dari pagu sub kegiatan Rp 2.900.000,- dengan persentase capaian 60,03 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.159.099,-.
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp 1.740.901,- dari pagu sub kegiatan Rp 2.900.000,- dengan persentase capaian 60,03 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.159.099,-.
10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp 500.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 500.000,- dengan persentase capaian 100 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 0,-.
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp 570.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 1.140.000,- dengan persentase capaian 50 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 570.000,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Perencanaan dan Keuangan didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Pengelolaan administrasi perencanaan yang dilakukan cukup baik oleh para PNS dan tenaga kontrak pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Terpenuhinya personil pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD yang cukup mumpuni di bidangnya.

f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada dianggarkan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I 75% dan triwulan IV 25%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Triwulan I 80% dan triwulan IV 20%. Dan Kegiatan evaluasi dan pelaporan kinerja pada Triwulan II 20% dan Triwulan III 40% dan Triwulan IV 40%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 70% dan Triwulan II 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan keuangan, diantaranya:

- Terlalu banyaknya tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan keuangan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keterlambatan atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan.

5.2 Kepala Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik tahun 2021.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik	Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui radio dan website ppid	700 data/informasi	700 data/informasi	100 %	90 data
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbantu dan memanfaatkan teknologi informasi	5 KIM	3 KIM	60 %	15 KIM
		Jumlah aspirasi/pengaduan publik yang terlayani	10 aduan	20 aduan	200 %	50 aduan
Rata-Rata Capaian					120 %	

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik terealisasi 120%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Kinerja Utama kegiatan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan

Informasi Publik telah terlaksana dengan hasil yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (120%) dan tahun 2020 (119%), hal ini menunjukkan hasil keluaran yang dicapai telah melampaui target dengan peningkatan meskipun hanya pada angka 1% dari tahun sebelumnya.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- **Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui radio dan website PPID**

Terealisasi sebanyak 700 data/informasi dengan target 700 data informasi, yang berarti terealisasi 100%. Data yang disampaikan melalui website PPID (<http://ppid.tanahlautkab.go.id/>) sebanyak 188 data dimana data tersebut langsung bersumber dari masing-masing PPID-Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya, dan ditambah data/informasi yang disebarakan melalui radio Tuntung Pandang FM sebanyak 512 informasi. Meskipun telah target telah tercapai 100% namun dalam pengelolaannya juga terdapat kendala yakni belum semua SKPD memahami akan pentingnya melakukan update data/informasi pada website PPID ini dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik. Untuk kedepannya akan diambil langkah monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepala Daerah.

Gambar tampilan awal website PPID Kabupaten Tanah Laut



- **Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang**
- **terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi**

Terealisasi sebanyak 3 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan target 5 KIM, sehingga persentase realisasi telah tercapai 60%. Pada tahun 2021 ini diperoleh jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi berjumlah 3 Kelompok dengan target tahun 2021 yaitu 5 KIM, sehingga diperoleh nilai realisasi yaitu 60 %. Sedangkan pada tahun 2020 telah terbentuk 3 KIM. Pada tahun 2021 ini capaian target berhasil tercapai sesuai target. Permasalahan yang dihadapi yakni masih adanya wilayah yang tidak memiliki jaringan internet yang baik atau wilayahnya tidak terjangkau internet sehingga terkendala saat mempublikasikan informasi melalui media website ataupun media sosial lainnya. Untuk selanjutnya Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ini terus dilakukan pembenahan dan peningkatan dalam bentuk desa informatik dengan menjalin koordinasi dengan Kepala Desa dan Camat

serta masyarakat untuk turut mendukung program Kota ditata Desa dibina.

- **Jumlah aspirasi/pengaduan publik yang terlayani**

Terealisasi sebanyak 20 aduan dengan target 10 aduan dan juga terealisasi melebihi target dengan persentase 200%. Aspirasi/Pengaduan yang masuk melalui portal e-lapor Kabupaten Tanah Laut akan langsung diproses secara sistem oleh admin pengelola utama e-lapor di tingkat daerah, kemudian akan disampaikan ke dinas teknis terkait aspirasi/aduan. Koordinas pengelolaan e-lapor juga dilakukan melalui grup WA secara intensif.

Gambar Kegiatan sosialisasi e-lapor



Gambar kegiatan penyampaian langsung informasi penggunaan e-lapor



d) *Analisis Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Menyiapkan pelaksanaan Forum konsultasi publik melalui siaran radio pada program dialog interaktif dalam program Tanah Laut Menyapa, Pojok UMKM, Halo Dokter, Halo Polisi dengan menghadirkan narasumber dari SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat.
3. Melaksanakan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Melaksanakan penyebaran informasi melalui media sosial dan radio Tuntung Pandang FM Pelaihari.
5. Membentuk Tim Pencanangan dan Pembinaan Desa Informatik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Guna Mendukung Program Desa Dibina Kota Ditata.

6. Melaksanakan peningkatan fasilitas ruangan Radio beserta peralatan penunjangnya.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik yaitu:

1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.088.300,- dari pagu sub kegiatan Rp 16.762.000,- dengan persentase capaian 84,05 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.673.700,-.
2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 339.959.761,- dari pagu sub kegiatan Rp 444.854.620,- dengan persentase capaian 76,42 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 104.894.859,-.
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.279.961.250,- dari pagu sub kegiatan Rp 2.439.290.470,- dengan persentase capaian 93,47 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 159.329.220,-.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Dukungan penuh dari Kepala Dinas dalam memberikan arahan dan inovasi untuk perbaikan pengelolaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.
- Perbaikan sarana dan prasarana pada Radio Tuntung Pandang FM dalam rangka peningkatan kualitas sinyal dan suara bagi pendengar radio.

g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dianggarkan pada Triwulan I 70%, Triwulan II 10% dan triwulan III 20%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan pada Triwulan I 20%, Triwulan II 20%, Triwulan III 30% dan Triwulan IV 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik khususnya untuk tenaga penyiar radio.

- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis pengelolaan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis penyiaran dan pengelola informasi publik.
- Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait pengelola informasi

5.4 Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan layanan komunikasi publik	Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa Daerah	500 informasi	500 informasi	100 %	10 dokumen
		Jumlah informasi publik yang disebarluaskan melalui media massa Daerah	300 informasi	300 informasi	100 %	50 permohonan
Rata-Rata Capaian					100 %	

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dalam Kegiatan pelaksanaan pengelolaan layanan komunikasi publik dengan indikator Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa Daerah terealisasi 500 informasi dengan target 500 informasi sehingga persentase capaiannya 100%, sedangkan Jumlah informasi publik yang disebarluaskan melalui media massa Daerah telah tercapai

300 informasi dari target 300 informasi sehingga tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Kinerja kegiatan pengelolaan saluran komunikasi Publik telah terlaksana dengan hasil yang diperoleh sesuai target yang ditetapkan.

b) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1) Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa daerah

Terealisasi sebanyak 500 informasi dengan target 500 informasi, yang berarti telah terealisasi 100%. Informasi diperoleh oleh tim jurnalis Dinas Kominfo diolah secara cermat untuk dilakukan publikasi di website portal Kabupaten Tanah Laut dan akun media sosial pemerintah Kabupaten Tanah Laut setiap harinya per bulan.

2) Jumlah informasi publik yang disebarluaskan melalui media massa daerah

Terealisasi sebanyak 300 informasi dengan target 300 informasi, yang berarti realisasi telah tercapai sesuai target dengan persentase capaian 100 %. Tahun 2021 media massa daerah yang dimiliki oleh Dinas Kominfo dikelola dalam bentuk kerja sama dengan media milik pihak ketiga berupa kerja sama penyebarluasan informasi melalui media cetak, media online, media elektronik. Adapun permasalahan yang sering dihadapi ialah kurangnya sarana prasarana penunjang untuk peliputan atau pengumpulan data informasi untuk membuat konten berita serta kurangnya SDM yang dimiliki pada Dinas Kominfo terkait jurnalistik.

c) *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media sosial fanpage Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan portal website Tanah Laut di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut www.portal.tanahlautkab.go.id.
2. Pro-Aktif dalam penyebarluaskan informasi valid dan cegah isu *hoax* virus corona melalui media pemerintah daerah.
3. Membentuk Tim Pencanaan dan Pembinaan Desa Informatik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Guna Mendukung Program Desa Dibina Kota Ditata.
4. Melaksanakan pembinaan bagi jurnalis dalam rangka perbaikan kepenulisan berita.

d) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 192.367.082,- dari pagu sub kegiatan Rp 199.934.566,- dengan persentase capaian 96,22 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 7.567.484,-.
2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 92.046.664,- dari pagu sub kegiatan Rp 117.947.776,- dengan persentase capaian 78,04% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 25.901.112,-.

e) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dianggarkan pada Triwulan I 70%, Triwulan II 10% dan triwulan III 20%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan pada Triwulan I 20%, Triwulan II 20%, Triwulan III 30% dan Triwulan IV 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

f) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, diantaranya:

- Kurangnya tenaga jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan
- Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk peliputan atau pengumpulan data informasi untuk membuat konten berita.
- Kurangnya SDM yang dimiliki pada Dinas Kominfo terkait jurnalistik.
- Anggaran untuk publikasi kegiatan pemerintah daerah pada media masih belum mencukupi.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website :
 - <http://ppid.tanahlautkab.go.id> (sejak tahun 2020)
 - <http://portal.tanahlautkab.go.id> (sejak tahun 2019)
- Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk peliputan atau pengumpulan data informasi.
- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait jurnalistik.
- Memanfaatkan secara optimal media-media informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online.

5.5 Kepala Seksi Infastruktur dan Teknologi

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Memfasilitasi dan memberikan layanan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah pengelolaan Pusat Data	1 paket	1 paket	100 %	5 unit
		Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan <i>e-government</i>	30 SKPD	30 SKPD	100 %	20 SKPD
		Jumlah permohonan penggunaan domain tanahlautkab.go.id yang terfasilitasi	4 permohonan	4 permohonan	100 %	15 permohonan
Rata-Rata Capaian					100 %	

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Infrastruktur dan teknologi dalam Kegiatan pelaksanaan memfasilitasi dan memberikan layanan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut adalah 100 % dengan indikator Jumlah pengelolaan Pusat terealisasi 1 paket dengan target 1 paket sehingga persentasenya 100%, Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan e-government telah tercapai 30 SKPD dari target 30 SKPD sehingga tercapai 100%, sedangkan Jumlah permohonan penggunaan domain tanahlautkab.go.id yang terfasilitasi telah tercapai 4 permohonan dengan target 4 permohonan sehingga capaiannya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Kinerja kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi telah terlaksana dengan hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang ditetapkan.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1) Jumlah pengelolaan Pusat Data (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Terealisasi sebanyak 1 paket dengan target 1 paket, yang berarti telah terealisasi 100%. Dinas Kominfo mengelola 1 paket pusat data yang terdiri atas pengelolaan server untuk *backup mirroring* aplikasi Pemerintah Daerah dan pengelolaan aplikasi daerah yang ada pada *Network Operation Center* sehingga akan memudahkan dalam pengelolaan jaringan yang lebih representatif. Pada Tahun 2021 ini telah dilaksanakan penerapan jaringan internet dan intranet terpadu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna mengoptimalkan pengelolaan internet serta penggunaan jaringan intra antar SKPD.

Gambar Rapat penyediaan jaringan internet terpadu pada Dinas
Kominfo



Gambar Server di Ruang Network Operation Center (NOC)
Dinas Kominfo





Gambar Gedung Command Center Kabupaten Tanah Laut



2) Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan E-Government

Terealisasi sebanyak 30 SKPD dengan target 30 SKPD, telah tercapai sesuai target namun masih ada 10 perangkat daerah yang masih belum terhubung dalam jaringan intranet Dinas Kominfo yaitu seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut kecuali Kecamatan Pelaihari. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah Struktur Geografis di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan Dataran tinggi dan belum adanya tower jaringan Diskominfo yang sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Tanah Laut menyebabkan beberapa kecamatan tidak bisa terjangkau dengan Jaringan Wireless yang ada. Langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu perlu adanya tower yang tingginya minimal 70 meter sesuai DED Jaringan.

3) Jumlah permohonan penggunaan domain tanahlautkab.go.id yang terfasilitasi

Terealisasi sebanyak 4 permohonan dengan target 4 permohonan, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Permohonan penggunaan domain ini diproses dengan adanya surat resmi dari SKPD yang meminta untuk difasilitasi dalam penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Proses fasilitasi sendiri dilakukan oleh bidang penyelenggaraan *E-government*, sehingga hasilnya dapat langsung dilakukan penyediaan hosting domain atas inovasi yang dihasilkan. Namun dalam prosesnya juga dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

d) *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan penyediaan layanan internet dan layanan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
2. Menyiapkan administrasi layanan internet gratis di fasilitas umum di wilayah Pelaihari
3. Melaksanakan penyediaan layanan-layanan terkait teknologi dan informasi bagi seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya pengembangan aplikasi, jaringan, integrasi data, layanan *hosting*, *colocation server* dan digitalisasi.
4. Melaksanakan kerjasama dengan Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government.
5. Melaksanakan penyediaan fasilitas video conference bagi SKPD di Lingkup Kabupaten Tanah Laut.
6. Menyiapkan administrasi pembangunan jaringan fiber optik dan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Melaksanakan peningkatan SDM aparatur dengan mengadakan diklat internal urusan teknologi informasi.
8. Menyiapkan administrasi pembangunan Gedung *Command Center* beserta fasilitas penunjangnya.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan teknologi hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp

2.580.416.867,- dari pagu kegiatan Rp 2.728.794.139,- dengan persentase capaian 94,56 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 148.377.272,-.

2. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.905.000,- dari pagu kegiatan Rp 24.650.000,- dengan persentase capaian 11,78 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 21.745.000,-.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.313.695.377,- dari pagu kegiatan Rp 1.403.673.865,- dengan persentase capaian 93,59 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 89.978.488,-.

f) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Telah terbangunnya jaringan intra terpadu seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Telah terbangunnya ruang *network operation center* (NOC) untuk pengelolaan pusat jaringan.
- Telah tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Infrastruktur dan Jaringan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah; Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dianggarkan sebagian besar pada Triwulan I 20%, Triwulan II 45% Triwulan III 10% dan triwulan IV 25%;
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Infrastruktur dan Jaringan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah; Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan pada Triwulan II 40%, Triwulan III 40% dan Triwulan IV 20% menyesuaikan anggaran kegiatan.

h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Seksi Infrastruktur dan Jaringan, diantaranya:

- Struktur Geografis di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan Dataran tinggi dan kurang tingginya tower Diskominfo yang ada menyebabkan beberapa kecamatan tidak bisa terjangkau dengan Jaringan Wireless.
- Tenaga Teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan terbatas.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Perlu pembangunan Tower bersama untuk memberikan layanan kepada kecamatan yang belum terkoneksi dengan jaringan Pemerintah Kabupaten.
2. Penambahan tenaga teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan teknis.

5.6 Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSentase CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Memfasilitasi dan memberikan layanan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	2 aplikasi
		Jumlah kajian arsitektur aplikasi, data dan layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4 Dokumen
Rata-Rata Capaian					100%	

a) Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi pengembangan aplikasi dalam kegiatan pelaksanaan memfasilitasi dan memberikan layanan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut adalah 100 % dengan indikator jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE terealisasi 2 aplikasi dengan target 2 aplikasi sehingga persentase capaiannya 100%, Jumlah kajian arsitektur aplikasi, data dan layanan telah tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga tercapai 100%.

b) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE**

Terealisasi sebanyak 2 aplikasi dengan target 2 aplikasi, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Pada tahun 2021 ini telah dibangun dan dikembangkan dua buah aplikasi penunjang e-government, yaitu pengembangan aplikasi tata naskah dinas elektronik dalam versi website dan pembangunan aplikasi *dashboard command center*. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah perlunya pembiasaan dalam penggunaan Sistem Tata Naskah Dinas ini di Kabupaten Tanah Laut di mana saat ini sebagian besar SKPD masih menggunakan metode manual sehingga perlu dilakukan Bimtek dan sosialisasi kembali, sedangkan aplikasi *dashboard command center* akan digunakan setelah perangkat *command center* tersedia.

Gambar Pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan Pengetahuan TIK



- **Jumlah kajian arsitektur aplikasi, data dan layanan**
Terealisasi sebanyak 1 Dokumen dengan target 1 Dokumen, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Adanya pembuatan dokumen kajian arsitektur SPBE bertujuan untuk menunjang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Gambar Dokumen Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur SPBE serta Dokumen Manajemen Risiko Keamanan Informasi



c) *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Kerjasama Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government.

2. Pembuatan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
3. Melaksanakan pengelolaan database pada aplikasi.
4. Tersedianya dokumen Arsitektur aplikasi, data dan layanan.

d) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik yaitu sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 141.000.000,- dari pagu kegiatan Rp 147.999.999,- dengan persentase capaian 95,27 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 6.999.999,-.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) pada Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 330.245.000,- dari pagu kegiatan Rp 339.650.000,- dengan persentase capaian 97,23 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 9.405.000,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Pengembangan Aplikasi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Koordinasi dari seluruh tim IT Dinas Kominfo dalam melaksanakan fasilitasi maupun penyusunan aplikasi

/sistem informasi penunjang pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

f) *Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Pengembangan Aplikasi pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Sub Kegiatan Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagian besar dianggarkan pada Triwulan I 20%, Triwulan II 45% dan Triwulan III 35%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Pengembangan Aplikasi pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Sub Kegiatan Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan II 10%, Triwulan III 10% dan Triwulan IV 5% menyesuaikan anggaran kegiatan.

g) *Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Pengembangan Aplikasi, diantaranya:

1. Kebutuhan Tenaga Teknis Pengembangan Aplikasi Belum Seimbang dengan jumlah kebutuhan permintaan pengembangan aplikasi
2. Minimnya anggaran untuk pembangunan aplikasi penunjang SPBE.
3. Belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik SKPD yang akan melakukan perencanaan penganggaran pengembangan aplikasi.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Perlu penambahan tenaga teknis khusus yang membidangi pengembangan aplikasi
2. Peningkatan anggaran pembuatan aplikasi guna menunjang implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan sosialisasi ataupun bimtek terkait aplikasi yang telah dibangun secara intensif ke SKPD.

5.7 Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	20 SKPD	1 SKPD	2,5 %	5 SKPD
		Jumlah aplikasi sistem (<i>web service API</i>) tandatangan digital terpusat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi
		Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi	1 kali	0 kali	0 %	5 kali
Rata-Rata Capaian					34,17 %	

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Seksi Persandian tahun 2021 hanya sebesar 34,17%. Terdiri dari 3 indikator, yaitu

indikator Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi dengan target 20 SKPD hanya tercapai 1 SKPD sehingga persentase capaian hanya 2,5%, indikator Jumlah aplikasi sistem (*web service API*) tandatangan digital terpusat dengan target 1 Aplikasi telah tercapai 100% (1 aplikasi), dan indikator Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi target 1 kali tercapai 0% (0 kali).

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian target tahun 2021 dengan tahun 2020 dengan terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi pada tahun 2021 hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika karena belum siapnya proses penilaian mandiri tersebut, sedangkan pada tahun 2020 masih belum pernah dilakukan penilaian sekalipun karena belum adanya persiapan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarannya sehingga belum ada capaian; pada indikator kedua yaitu Jumlah aplikasi sistem (*web service API*) tandatangan digital terpusat dengan target 1 Aplikasi telah tercapai 100%, indikator ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 2021; dan indikator jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi tahun 2021 tidak tercapai disebabkan ada kendala teknis kesiapan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan kesiapan sistem sendiri yang harus diujicobakan setelah dibangun.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi**

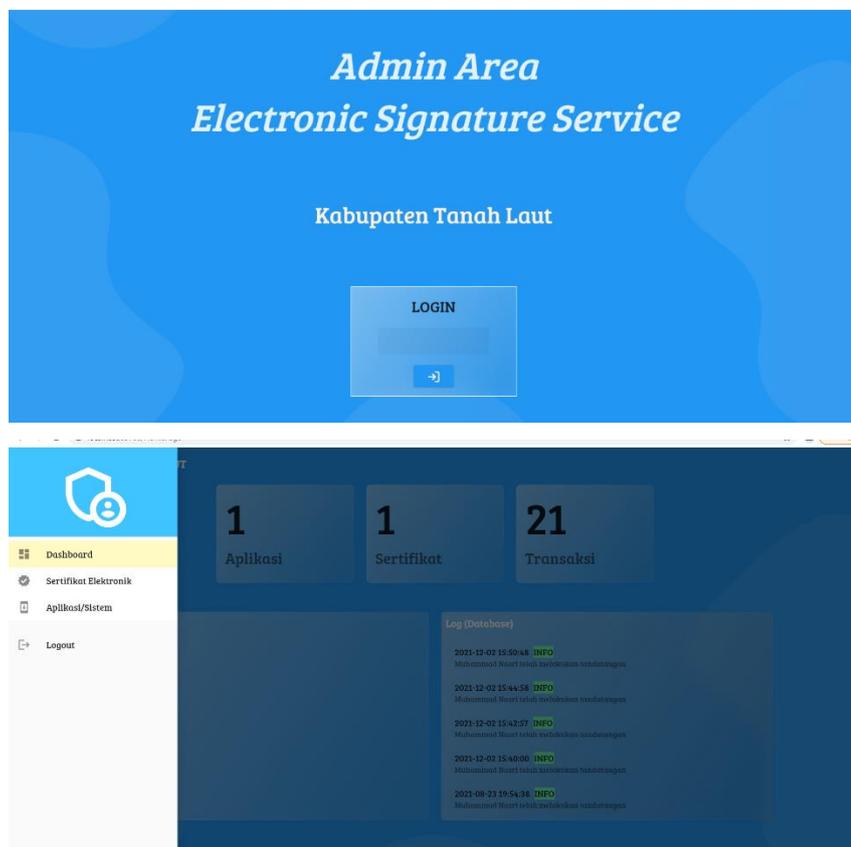
Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi hanya tercapai 1 SKPD pada tahun 2021 (2,5%) hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika karena belum siapnya proses penilaian tersebut, sedangkan pada tahun 2020 masih belum pernah dilakukan penilaian sekalipun karena belum adanya persiapan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarananya sehingga belum ada capaian.

- **Jumlah aplikasi sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat**

Terealisasi sebanyak 1 aplikasi dengan target 1 aplikasi, yang berarti realisasi telah tercapai 100%. Tahun 2021 ini Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah dibangun menggunakan konsep pengoperasian sertifikat elektronik tipe PKCS#12 atau .p12 yang disimpan di sistem/server Dinas Kominfo. Ketika sistem ini selesai dibangun (pada Bulan November 2021), tiba surat pemberitahuan dari Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 11 November 2021 yang menginformasikan bahwa BSrE sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik akan menghentikan layanan pembaruan untuk sertifikat elektronik dengan tipe PKCS#12 pada 1 Desember 2021, selain itu dari BSrE juga menyediakan modul untuk integrasi sistem. Hal ini berarti agar bisa terus dimanfaatkan, maka sistem yang ada harus

diubah/diperbarui baik secara arsitektur maupun proses dengan mengintegrasikan modul TTE dari BSrE BSSN.

Gambar tampilan *web service* API dari Sistem Tanda tangan Elektronik yang telah dibangun tahun 2021



- **Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi**

Pelaksanaan sosialisasi persandian dan keamanan informasi ini tidak dapat terealisasi/tercapai disebabkan ada kendala teknis kesiapan dari Dinas Kominfo dan kesiapan sistem sendiri yang harus diujicobakan setelah dibangun.

d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Melaksanakan inventarisasi seluruh SKPD untuk diusulkan kembali terkait penggunaan tanda tangan elektronik ke BSSN.
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan personil yang ada dalam memahami tentang persandian dan keamanan informasi.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang pentingnya keamanan informasi.

d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Persandian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32.175.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 44.040.390,- dengan persentase capaian 73,06 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 11.865.390,-.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis terkait capaian kegiatan pada Seksi Persandian dapat dikatakan sangat minim mengingat minimnya anggaran yang ada pada seksi persandian namun tahun 2021 telah diupayakan beberapa hal diantaranya:

- Minimnya tenaga personil yang ada pada seksi Persandian sehingga hanya dapat melaksanakan tahap

awal pengusulan pemanfaatan persandian dengan menggunakan tanda tangan elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

- Melaksanakan peningkatan SDM pada seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dengan mengikuti kegiatan pelatihan maupun bimtek secara virtual.

f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan pada Triwulan I 30% dan Triwulan II 70%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Triwulan I 50% dan Triwulan II 50% menyesuaikan ketersediaan anggaran.

g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya:

1. Kurangnya personil yang ada pada Seksi Persandian khususnya untuk jabatan fungsional Sandiman maupun

operator Sandi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis persandian dan keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
4. Belum tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
5. Adanya perubahan Sistem dari BsrE BSSN sehingga sistem yang ada harus diubah/diperbarui baik secara arsitektur maupun proses dengan mengintegrasikan modul TTE BsrE BSSN.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Persandian dan keamanan informasi pada bidang Statistik dan Persandian.
2. Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait Persandian dan Keamanan Informasi.
3. Melakukan sosialisasi tentang Persandian dan pentingnya keamanan informasi.
4. Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
5. Koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan pihak BsrE terkait teknis penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik dengan modul baru.
6. Asistensi penerapan modul TTE BsrE untuk integrasi ke sistem yang sudah ada
7. Mempersiapkan server *development/production* untuk uji coba penerapan sistem yang sudah diperbarui.

5.8 Kepala Seksi Pengelolaan Statistik

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSentase CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengisian indikator pada aplikasi Satu Data Tanah Laut	Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	1 aplikasi
		Jumlah cetak dokumen Statistik Sektorial daerah	1 buku	1 buku	100%	1 buku
		Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut	20 orang	20 orang	100 %	20 orang
Rata-Rata Capaian					100 %	

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Seksi Pengelolaan Statistik tahun 2021 telah tercapai 100%. Terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai dengan target 1 aplikasi tercapai 100% (1 aplikasi), indikator Jumlah buku cetak dokumen Statistik Sektorial daerah dengan target 1 buku tercapai 100% (1 buku), dan indikator Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut telah tercapai 100% (20 orang).

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian target tahun 2021 dengan tahun 2020 terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai telah tercapai 1 aplikasi

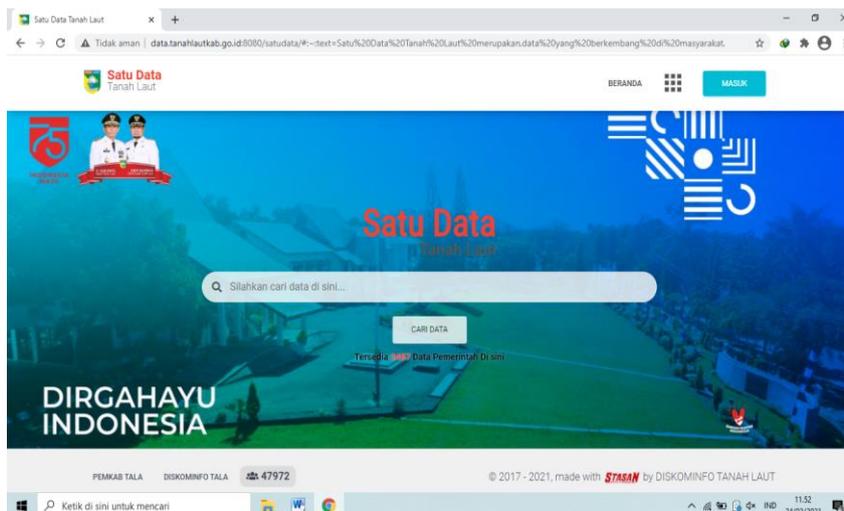
pada tahun 2021 dan di tahun 2020 juga tercapai 1 aplikasi; pada indikator jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah pada tahun 2021 telah tercapai 1 buku dan tahun 2020 juga tercapai 1 buku; pada indikator ketiga yaitu jumlah admin masih Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian Indikator/Eemen aplikasi Satu Data Tanah Laut telah tercapai 20 orang sesuai dengan target 20 orang pada tahun 2021 sama dengan capaian tahun 2020. Secara keseluruhan persentase capaian adalah 100%, namun akan tetap dilakukan penyesuaian dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai**

Terealisasi sebanyak 1 aplikasi dengan target 1 aplikasi, yang berarti telah terealisasi 100%. Tersedianya aplikasi Satu Data yang memadai bertujuan agar data yang tersedia dapat akurat dan dipertanggungjawabkan. Beberapa data dari beberapa SKPD dikumpulkan ke dalam satu sistem aplikasi yaitu aplikasi Satu Data yang diinputkan langsung oleh masing-masing admin SKPD sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan data yang mendasar. Kedepannya Aplikasi Satu Data masih harus dikembangkan seiring berkembangnya kebutuhan-kebutuhan data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Gambar tampilan aplikasi Satu Data Tanah Laut tahun
Update tahun 2020



Gambar tampilan aplikasi Satu Data Tanah Laut tahun
Update tahun 2021



- **Jumlah buku data statistik sektoral**

Terealisasi sebanyak 1 buku dengan target 1 buku, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Keberhasilan atas capaian ini merupakan usaha dari seluruh elemen terkait dalam usaha mengumpulkan dan meninputkan data ke dalam Aplikasi Satu Data Tanah Laut. Dari seluruh data yang terhimpun akan diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sektoral oleh analis statistik dan Kepala Seksi Pengelolaan Statistik sesuai bimbingan Kepala Bidang Statistik dan

Persandian serta arahan dari Kepala Dinas Kominfo, kemudian data tersebut disusun menjadi buku data statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut atau diberi nama ikhtisar statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah perlunya menambah wawasan bagi admin Satu Data Tanah Laut dalam pengelolaan data karena data dalam aplikasi perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi statistik yang bisa dipublikasikan sehingga perlu penyusunan buku-buku statistik yang lain.

Gambar Cetak Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut Data Pembangunan tahun 2020



- **Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut**

Terealisasi sebanyak 20 orang dengan target 20 orang yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan seluruh admin SKPD sungguh-sungguh

dalam proses belajar dan menginput data ke dalam aplikasi Satu Data. Kedepannya perlu menambah wawasan bagi admin Satu Data.

c) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Melaksanakan sosialisasi Satu Data Tanah Laut ke SKPD di Lingkup Pemkab Tanah Laut.
2. Melaksanakan pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data.
3. Melaksanakan pengembangan dan update aplikasi Satu Data Tanah Laut.
4. Melaksanakan koordinasi terkait program kegiatan bidang statistik dan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Melaksanakan pencetakan Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut.

d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Statistik hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.345.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 74.910.000,- dengan persentase capaian 67,21 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 24.565.000,-.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Pengelolaan Statistik didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Dalam penyusunan data statistik sektoral daerah menggunakan SDM admin seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal pengisian data statistik.
2. Proses pengolahan akhir buku statistik Sektoral dengan melibatkan tenaga kontrak pada internal Dinas Kominfo serta tenaga dari pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh SKPD dalam hal pengisian data dan selaku produsen data yang bertanggung jawab atas data yang diisikan pada aplikasi Satu Data Tanah Laut.

f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Pengelolaan Statistik pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dianggarkan pada Triwulan I 10%, Triwulan II 70% dan Triwulan IV 20%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Pengelolaan Statistik pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dilaksanakan pada Triwulan I 10%, Triwulan II 70% dan Triwulan IV 20%.

g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Seksi Pengelolaan Statistik, diantaranya:

1. Tidak adanya personil/staf pelaksana pada Seksi Pengelolaan Statistik.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis terkait pengelolaan statistik.
3. Setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data.
4. Belum Lengkapnya Data Statistik Sektoral yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Melakukan pengusulan penambahan personil/staf teknis pengelolaan statistik.
2. Peningkatan SDM pegawaiia melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait pengelolaan statistik.
3. Melakukan sosialisasi tentang petunjuk pengisian aplikasi Satu Data Tanah Laut.
4. Peningkatan SDM admin setiap SKPD dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
5. Pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala oleh produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

Ringkasan Realisasi APBD SKPD 2020 dan 2021

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Realisasi			%	Realisasi			%	Peningkatan /Penurunan (%)
		Pagu Tahun 2020	Pagu APBD-P Tahun 2020	Tahun 2020		Pagu Tahun 2021	Pagu APBD-P Tahun 2021	Tahun 2021		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	4		4	5					
1.	PENDAPATAN	491.200.000	523.128.000	606.694.000	115,97	530.496.000	550.144.000	564.880.000	102,68	-13,29
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	491.200.000	523.128.000	606.694.000	115,97	530.496.000	550.144.000	564.880.000	102,68	-13,29
	Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	491.200.000	523.128.000	606.694.000	115,97	530.496.000	550.144.000	564.880.000	102,68	-13,29
2.	BELANJA	10.431.857.159	8.454.584.720,04	7.403.577.517	87,57	13.136.084.538	13.095.733.027	11.198.671.599	85,51	-2,06
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.507.904.606	3.364.096.713,04	2.689.041.007	79,93	4.017.535.928	4.017.535.928	2.871.055.199	71,46	-8,47
	Gaji dan Tunjangan	1.691.640.344	1.691.640.344	1.299.406.580	76,81	1.588.766.592	1.588.766.592	1.161.395.432	73,1	-3,71
	Tambahan Penghasilan PNS	1.816.264.262	1.672.456.369,04	1.389.634.427	83,09	2.428.769.336	2.428.769.336	1.709.659.767	70,39	-12,7

2.2.	BELANJA LANGSUNG	6.923.952.553	5.090.488.007	4.714.536.510	92,61	9.118.548.610	9.078.197.099	8.327.616.400	91,73	-0,88
	Belanja Pegawai	65.895.000	64.895.000	49.495.000	76,27	0	0	0	0	-76,27
	Belanja Barang dan Jasa	2.297.340.158	2.060.820.357	1.809.262.214	87,79	6.582.260.263	7.461.281.615	6.837.963.714	91,65	3,86
	Belanja Modal	4.560.717.395	2.964.772.650	2.855.779.296	96,32	2.536.288.347	1.616.915.484	1.489.652.686	92,13	-4,19
	Jumlah	9.940.657.159	7.931.456.720,04	6.796.883.517	85,70	12.605.588.538	12.545.589.027	10.633.791.599	84,76	-0,94

Gambaran tabel 3.26 tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2021 ada penurunan 13,29 % dari tahun 2020, namun pendapatan pada tahun 2021 masih melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya tambahan pendapatan dari pembayaran retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi atas bangunan menara yang telah dibangun pada tahun 2020. Pada pos belanja tahun ini realisasi penyerapan dananya sebesar Rp. 11.198.671.599 (85,51%), terjadi penurunan 2,06 % dari belanja tahun 2020 sebesar Rp. 7.403.577.517 (87,57%), namun penurunan tersebut bukan disebabkan tidak tercapainya target kinerja melainkan pada tahun 2021 anggaran belanja lebih besar dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2020.

Tabel 3.27 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	4	4	5
1.	PENDAPATAN	550.144.000	564.880.000	14.736.000
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	550.144.000	564.880.000	14.736.000
	Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	550.144.000	564.880.000	14.736.000
2.	BELANJA	13.095.733.027	11.198.671.599	1.897.061.428
2.1.	BELANJA OPERASI	11.478.817.543	9.709.018.913	1.769.798.630
	- Belanja Pegawai	4.017.535.928	2.871.055.199	1.146.480.729
	- Belanja Barang dan Jasa	7.461.281.615	6.837.963.714	623.317.901
2.2.	BELANJA MODAL	1.616.915.484	1.489.652.686	127.262.798
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.458.315.484	1.344.627.686	113.687.798
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.500.000	15.500.000	12.000.000
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
	- Belanja Modal Aset Tatap Lainnya	131.100.000	129.525.000	1.575.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		12.545.589.027	10.633.791.599	1.911.797.428

Dilihat dari pendapatan yang diperoleh dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 ini mengalami **SILPA** anggaran pembiayaan sebesar **Rp. 1.911.797.428,-** (*Satu milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

- Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.28 Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
I	- Administrasi umum dan kepegawaian - Kualitas pelaporan dan perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.113.225.202	3.828.366.298	74,87 %
II	Penyebaran informasi dan komunikasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.218.789.432	2.918.423.057	90,19 %
III	Pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.644.768.003	4.368.262.244	94,05 %
IV	Kualitas data statistik sektoral SKPD	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.910.000	50.345.000	67,21 %
V	Pemanfaatan sandi (keamanan informasi)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	44.040.390	32.175.000	73,06 %
		Jumlah	13.095.733.027	11.198.671.599	85,51 %

- Realisasi Belanja Pegawai

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021

No.	Uraian	Pagu anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.45.386.900,00	863.734.469,00	75,41
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	143.268.692,00	94.039.564,00	65,64
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	147.630.000,00	125.275.000,00	84,86
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.080.000,00	0,00	0
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.660.000,00	17.785.000,00	58,01
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.041.000,00	55.546.140,00	73,05
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.000.000,00	5.001.763,00	35,73
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	700.000,00	13.496,00	1,93
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.000.000	0	0
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.428.769.336,00	1.709.659.767,00	70,39
Jumlah		4.017.535.928,00	2.871.055.199,00	71,46

3. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	85,51	91,67%	6,16%
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	94,05%	45%	-49,05%
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	94,05%	100%	5,95%
4	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	94,05%	100%	5,95%
5	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	90,19%	97,33%	7,14%
6	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	90,19%	100%	9,81%
7	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	73,06%	4,8%	-68,26%
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	74,87%	100%	25,13%
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	74,87%	99,90%	25,03%
		Nilai SAKIP SKPD			
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	67,21%	100%	32,79%

4. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

TABEL 3.25 Tabel Realisasi APBD Tahun 2020 dan 2021

No	Tahun 2020				Tahun 2021			
	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Program/Kegiatan (sub kegiatan)	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	792.641.867	749.743.264	94,59	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.410.308	379.295.092	91,09
	-	-	-	-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.648.500	3.402.000	60,23
1.1	Penyedia rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	249.300.480	248.135.881	99,53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.381.038	326.269.542	96,42
1.2	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	127.665.900	107.289.236	84,04	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.570.920	22.500.750	63,26
	-	-	-	-	Penyediaan bahan logistik kantor	20.230.700	20.228.200	99,99
	-	-	-	-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.579.150	6.894.600	41,59
	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.012.238	155.516.142	74,05
1.3	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	415.675.487	394.318.147	94,86	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.401.152	49.179.324	95,68
	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.999.600	71.807.522	57,91
	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.611.486	34.529.296	99,76
2	Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas sumber Daya Manusia	446.754.468	399.599.115	85,61	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.676.600	251.689.436	90,32

	-	-	-	-	Pengadaan Mebel	82.799.610	60.759.436	73,38
2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	258.584.210	241.603.840	93,43	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.876.990	192.030.000	98,04
	-	-	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.424.552	111.322.052	94,00
	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.909.772	6.052.500	87,59
	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.379.228	30.588.700	84,08
2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	88.820.258	39.721.275	44,72	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000	23.400.000	100
2.3	Pembangunan Gedung Kantor	50.350.000	49.689.000	98,69	-	-	-	-
2.4	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	62.000.000	61.585.000	99,33	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	51.735.552	51.280.852	99,12
	-	-	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.632.800	27.524.000	89,85
	-	-	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.632.800	27.524.000	89,85
2.5	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	7.000.000	7.000.000	100,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	22.490.000	0	0,00	-	-	-	-

3.1	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	22.490.000	0	0,00	-	-	-	-
4	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.147.889.600	2.948.483.645	93,67	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.728.794.139	2.580.416.867	94,56
4.1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	3.028.089.600	2.844.525.495	93,94	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.728.794.139	2.580.416.867	94,56
	-	-	-	-	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.915.973.864	1.787.845.377	93,31
	-	-	-	-	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	24.650.000	2.905.000	11,78
	-	-	-	-	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.403.673.865	1.313.695.377	93,59
4.2	Penyusunan aplikasi sistem informasi	119.800.000	103.958.150	86,78	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	147.999.999	141.000.000	95,27
	-	-	-	-	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	339.650.000	330.245.000	97,23
5	Pengelolaan Komunikasi Publik	619.475.472	578.287.986	93,35	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.218.789.432	2.918.423.057	90,19
5.1	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	589.195.472	562.316.273	95,44	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	16.762.000	14.088.300	84,05
	-	-	-	-	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	199.934.566	192.367.082	96,22
	-	-	-	-	Pengelolaan Media Komunikasi publik	117.947.776	92.046.664	78,04
	-	-	-	-	Pelayanan Informasi Publik	444.854.620	339.959.761	76,42

	-	-	-	-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.439.290.470	2.279.961.250	93,47
5.2	Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	30.280.000	15.971.713	52,75	-	-	-	-
6	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan informasi	3.637.600	3.387.600	93,13	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.040.390	32.175.000	73,06
6.1	Fasilitasi persandian dan pengamanan informasi	3.637.600	3.387.600	93,13	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	44.040.390	32.175.000	73,06
7	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	6.804.000	5.559.900	81,72	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.992.776	29.153.476	78,81
7.1	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	2.129.400	1.680.900	78,94	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000	0	0
	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.515.000	1.900.000	75,55
	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.290.000	100.000	4,37
	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.740.000	1.032.500	37,68
	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.440.000	807.500	33,09
	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.440.000	2.212.500	64,32
	-	-	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.267.776	23.100.976	99,28
	-	-	-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.022.075.928	2.873.866.100	71,45

	-	-	-	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.017.535.928	2.871.055.199	71,46
	-	-	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.900.000	1.740.901	60,03
7.2	Penyusunan laporan keuangan	4.174.600	3.379.000	80,94	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	100
	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1.140.000	570.000	50
7.3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	500.000	500.000	100,00	-	-	-	-
8	Pengembangan Data/Informasi	30.795.000	29.475.000	95,71	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.910.000	50.345.000	67,21
8.1	Penyusunan profile daerah	30.795.000	29.475.000	95,71	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	74.910.000	50.345.000	67,21
	JUMLAH	5.090.488.007	4.714.536.510	92,61	JUMLAH	13.095.733.027	11.198.671.599	85,51

Dari tabel perbandingan realisasi anggaran capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 dengan Tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa belanja tahun 2020 dengan pagu anggaran Rp 5.090.488.007,- telah terealisasi sebesar Rp 4.714.536.510,- dengan persentase 92,61 % sedangkan pada tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp 13.095.733.027,- telah terealisasi sebesar Rp 11.198.671.599,- dengan persentase 85,51 %. Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan realisasi sebesar 7,1 %. Pagu anggaran belanja yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2020, untuk efisiensi dan efektivitas anggaran pada kegiatan yang prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Koordinasi antar instansi yang masih belum optimal dalam mendukung terlaksananya implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.

3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan membentuk tim internal evaluasi mandiri SPBE dalam rangka pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut dengan menyusun jadwal kegiatan evaluasi mandiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan **realisasi fisik 92,96%** dan **realisasi keuangan 85,51 %**, dengan kategori capaian realisasi fisik **sangat tinggi** dan realisasi keuangan **tinggi**, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan

kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Memberi dukungan kepada para *leader* untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah membuat rancangan *road map* pembangunan infrastruktur E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun kedepannya yang meliputi sebagai berikut:

1. Tanah Laut *Smart Government dan Smart City*

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

2. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan

tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

3. Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah SPBE.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan SPBE yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

5. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat perlu direspon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

Pelaihari, Februari 2022

 **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut.**


Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020